LAKIP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOMBANA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I
PENDAHULUAN ……. 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum ……. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ……. 3
1.4. Gambaran Umum Organisasi ……. 3
a. Tugas Pokok dan Fungsi …… 3
b. Struktur Organisasi ……. 5
c. Sumber Daya Manusia 6
d. Sarana dan Prasarana ……..... 6

BAB II 8
PERENCANAAN KINERJA ……..... 8

2.1. Rencana Strategis 8
2.2 Rencana Kinerja ……. 9
2.3 Perjanjian Kinerja ……. 11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 14
3.2. Capaian Kinerja Utama dan Indikator Sasaran …….. 14
3.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ……. 19
3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah …….. 21
3.5. Realisasi Anggaran 22

BAB IV 25
PENUTUP ……..... 25

2DAFTAR TABEL

Gambar 1 …… 4

Tabel 1.1 Daftar rekapitulasi Aparatur menurut golonganTahun 2022 6

Tabel 1.2 Daftar rekapitulasi aparatur berdasarkan jenjang pendidikanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 …… 6

Tabel 1.3 Daftar rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 …… 6

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9

Tabel 2.2 Tabel IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2022 13

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022 ……. 15

Tabel 3. 2 Realisasi Program (outcome) DISDUKCAPIL Tahun 2022…… 16

Tabel 3.3.1 Analisis Capaian IKU DISDUKCAPIL Tahun 2022 …… 20

Tabel 3.3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran…….. 21

Tabel 3.4 Permasalahan dan upaya pemecahan masalah…… 22

Tabel 3.5.1 Alokasi Anggaran Belanja Per sasaran strategis Tahun 2022…… 23

Tabel 3.5.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2022…….. 24

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh Pemerintah yang terdiri dari : Pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinassian Pendaftaran dan Penerbitan KTP, Pencatatan Mutasi Penduduk, Pengelolaan data penduduk. Sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistic dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi Hukum

Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatar belakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Program dan kegiatan, rencana pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pelaksanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut **:**

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4330);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Nomor 2)
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
j. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2022;
k. Peraturan Bupati Bombana Nomor 89 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 adalah,

a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah;
c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public di bidang administrasi kependudukan;
e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan program dan Kegiatan kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya;
f. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

a. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bombana (lembaran daerah nomor 2), yang dijabarkan secara spesifik dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bombana.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Bupati dalam kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris

   Sekertaris membawahi :

   (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

   (2) Sub Bagian Umum ,Kepegawaian dan perlengkapan
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi ;
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
7. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan KB.

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bombana sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana

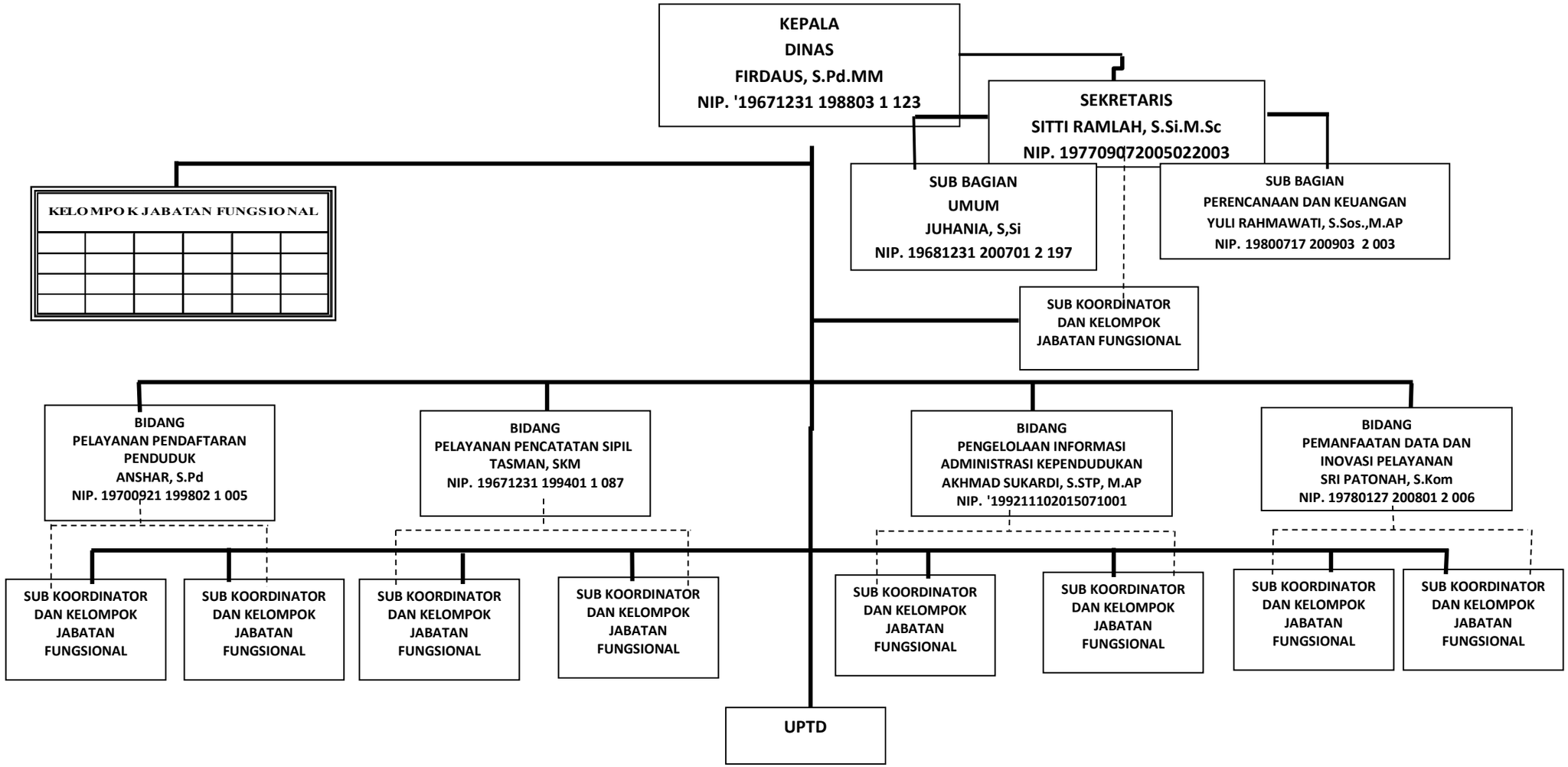

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana didukung oleh personil yang terdiri atas ASN 27 orang dan Non ASN 53 orang.

Adapun personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai berdasarkan Gender, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan Ruang				Tingkat Pendidikan					
	LK	PR	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
80	47	33	0	4	19	4	0	0	4	0	19	4

c. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana juga didukung oleh sarana dan prasarana yang secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2
Daftar Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Jenis	Nilai (Rp)
A	**Aset tetap**	**2.543.274.227**
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	2.250.312.006
3	Gedung dan bangunan	290.617.221
4	jalan, irigasi, dan jaringan	-
5	Aset tetap lainnya	2.345.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
B	**Aset Lainnya**	**174.870.033**
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	159.870.032
3	Gedung dan bangunan	-
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	15.000.001
5	Aset tetap lainnya	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
C	**Total jumlah**	**2.718.144.260**

1. Fungsi Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada kedudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependuudkan dan pencatatan sipil, dengan tugas pokok dan fungsi membantu sebagian tugas Bupati dalam kebijakan teknis di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang administrasi kependudukan.
2. Memantapkan komitmen dan sinergitas melalui koordinasi, integrase dan sinkronisasi pembangunan bidang administrasi kependudukan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bombana, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian
2. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative
3. Belum adanya tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (arsiparis)
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah)
5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
6. Masih adanya penduduk yang memiliki NIK Ganda
7. Blangko KTP-el diadakan oleh pusatPenghapusan data duplicate record masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan progres prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif, dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) transisi Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bombana, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) transisi ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) Tahun, yaitu Tahun 2023-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MISI : MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI	
Tujuan OPD	**Sasaran OPD**
Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana menyusun dan melaksanakan 2 (Dua) arah kebijakan RPD sebagai berikut :

1. Penguatan daya dukung pelayanan public yang prima;
2. Peningkatan inovasi daerah dalam pelayanan public.

Berdasarkan ke dua kebijakan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana menetapkan langkah strategis, yaitu Meningkatkan efektivitas dan asistensi pelaksanaan pelayanan public melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten dan berbasis kepuasan masyarakat.

Seluruh kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2023-2026. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas tujuan dan sasaran pembangunan pelayanan public yang berkualitas di Kabupaten Bombana.

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota dirumuskan indikator kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dirumuskan target indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL 2.2 IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	%	Jumlah Cakupan KK, KTP el, KIA, Akta Perkawinan dan akta kelahiran/5	
2	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Nilai predikat SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat	

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka sesuai amanah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja rencana kinerja tahunan, maka Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahunan dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Adapun penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022 telah dilakukan pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja Permenpan dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jln. Kompleks Perkantoran Lameroro No … Rumbia 93771

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRDAUS, S.Pd.M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir.H. BURHANUDDIN,M.Si**
Jabatan : **Pj.Bupati Bombana.**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mengetahui, **Rumbia, Nopember 2022**

Pj. Bupati Bombana

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si

FIRDAUS, S.Pd.M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19671231 198803 1 123

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	87,80%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah	BB

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
A	Program Pendaftaran penduduk	212.308.000	246.864.500	
B	Program Pencatatan Sipil	107.929.600	107.929.600	
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	985.536.700	1.001.273.000	
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.552.126.480	4.091.712.710	
JUMLAH		**5.170.782.080**	**5.455.972.210**	

Rumbia, Nopember 2022

BUPATI BOMBANA

Ir.H. BURHANUDDIN,M.Si

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

FIRDAUS, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19671231 198803 1 123

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran nilai indicator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indicator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat rendah	

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indicator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	87,80%	91,08%	103,73
2	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah	BB	BB	100

Indikator kinerja diperoleh dengan perhitungan Formulasi sebagai berikut:

a. Nilai Indeks tata Kelola kependudukan dan pencatatan sipil
b. Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bombana.

maka capaian kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	**Interval Nilai Realisasi Kinerja**	**Kriteria Penilaian Realisasi kinerja**	**Kode**
1	≥ 90,1	Sangat tinggi	

Realisasi Program (outcome) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Pencapaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang memadai	4.238.820.310	4.118.335.812	97,16
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang baik	Jumlah dokumen Perencanaan, RKA, dan DPA yang ditetapkan	165.269.600	164.821.871	99,73
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Jumlah laporan Penatausahaan dan keuangan yang disusun	2.678.717.830	2.589.085.164	96,65
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya penatausahaan barang milik daerah yang baik	Persentase laporan hasil penatausahaan	21.060.000	21.049.230	99,95
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-Tingkat kedisiplinan aparatur -persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi organisasi	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai aturan yang berlaku	49.900.000	49.891.387	99,98
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	526.072.300	520.044.642	98,85
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang dipenuhi berdasarkan standar kebutuhan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	470.640.580	451.067.300	95,84
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	82.260.000	78.888.547	95,90
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan barang milik daerah dalam kondisi baik	244.900.000	243.487.671	99,42

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Capaian dokumen kependudukan yang disusun dan diterbitkan	246.864.500	241.448.800	97,81
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pendaftaran penduduk	JumlahPemenuhan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	186.378.500	182.434.800	97,88
		Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Cakupan dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	55.486.000	55.384.000	99,82
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan Terkait Pendaftaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk	5.000.000	3.630.000	72,60
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan layanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	107.929.600	105.799.800	98,03
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	47.663.600	47.464.800	99,58
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terkait pencatatan sipil	persentase dokumen pencatatan sipil yang disusun dan di terbitkan	55.266.000	54.705.000	98,98
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan dan pengawasan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	55.266.000	54.705.000	98,98

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah layanan data kependudukan yang	1.001.273.000	983.285.297	98,20
		Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan			
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase database kependudukan yang termanfaatkan	Persentase layanan database kependudukan yang disajikan	585.990.250	579.653.000	98,92
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan masyarakat yang terlayani dokumen kependudukannya	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan mobile	59.971.000	59.735.937	99,61
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kegiatan Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	327.311.750	316.107.050	96,58
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan aparatur SIAK yang terlatih	Persentase Pengelola SIAK bersertifikat	28.000.000	27.789.310	99,25
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Cakupan penyusunan profil kependudukan	Persentase penyediaan data	8.192.400	8.190.000	99,97
	Penyusunan profil kependudukan	Persentase pemenuhan data kependudukan yang disajikan	Persentase profil kependudukan yang disajikan	8.192.400	8.190.000	99,97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi capaian Indicator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indicator sasaran kinerja berkriteria sangat tinggi, dengan capaian sebesar 103,73 % untuk IKU Indeks Tata Kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan capaian sebesar 100% untuk hasil evaluasi SAKIP.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana didukung oleh bidang-bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana sebagai Langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem APIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak Tahun 2002 walaupun belum secara menyeluruh. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 ini merupakan pelaporan kinerja bertolok ukur pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.1 ANALISIS CAPAIAN IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

No	OPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TERHADAP HAMBATAN
							KEBERHASILAN	HAMBATAN	
I	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Tata Kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,80	91,08	103,73	Pencapaian telah melebihi ketentuan target		
							Pencapaian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan adanya pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang sulit menjangkau ibukota Kabupaten dan pelayanan dari rumah ke rumah bagi orang sakit, renta maupun penyandang difabel, Dinas Kependudukan juga melakukan perjanjian kerjasama atau MOU dengan beberapa OPD yang melakukan pelayanan dengan menggunakan NIK sehingga antusiasme masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukan meningkat	Yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pelayanan yang berbasis teknologi informasi sehingga apa yang menjadi evaluasi dari Kemendagri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan	Melanjutkan amanat Ditjen Administrasi Kependudukan untuk menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan sosialisasi kepeada massyarakat tentang penggunaan aplikasi tersebut
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatatan	Penilaian SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat	BB	BB	72,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, telah membuat PK sampai ke level Eselon IV, serta menetapkan SK IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah menyusun rencana aksi dalam pencapaian IKU	Masih mengembangkan sistem perencanaan yang berbasia aplikasi teknologi	
								Sistem pengukuran dan pelaporan kinerja belum berbasis aplikasi teknologi informasi	Menambah kualitas dan kuantitas pelaporan dalam penyusunan laporan kinerja sesuai hasil evaluasi
								Hasil penilaian SAKIP belum dijadikan dasar kebijakan reward dan punishment	

Sasaran : Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran tersebut sebagai indicator kinerja Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil dimana total jumlah pelayanan yang masuk dalam indikator kinerja utama akan dibagi dengan total jumlah layanan yang dilaksanakan.

Tabel 3.3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	80,90%	87,80	91,08	103,73%	100	103,73%
2	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah	B	B	B	B	B	B

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) indicator tersebut berkriteria sangat tinggi. Capaian Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capain pada tahun 2022 dan sudah melebihi target.

Target capaian tahun 2022 untuk rata-rata indeks tata Kelola kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 103,73%. Untuk IKU hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat Daerah telah menyumbangkan 100% yang mana telah melampaui target IKU di Tahun 2022 yaitu sebesar 87,80%.

3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dihadapkan pada beberapa kondisi umum saat ini , berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya pemecahannya.

No	Permasalahan	Solusi
1	Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK) untuk pelayanan penerbitan KIA Kolektif
2	Cakupan kepemilikan Akta kelahiran anak usia 0-18 tahun belum optimal	Melakukan kegiatan jemput bola di desa-desa, dan inovasi go akta bekerjasama dengan puskesmas dan Rumah Sakit
3	Penyajian data NR selalu mengalami keterlambatan / tidak tepat waktu. Data NR (Nikah-Rujuk) tidak dapat diperoleh secara cepat karena menjadi kewenangan dari KEMENAG	Dinas Dukcapil kabupaten Bombana melakukan terobosan/inovasi baru dengan menjalin kerjasama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Bombana yaitu sinkronisasi antara SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)
4	Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah. Kondisi yang demikian mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid atau akurat	Menerbitkan KTP baru (KTP dengan status baru) bagi penduduk Kabupaten Bombana yang melangsungkan pernikahandengan menghadirkan Perwakilan dari Dinas Capil Sebagai Instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan seluruh KUA di Kabupaten Bombana
5	Pemutakhiran data belum optimal	1. Sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pemutakhiran data penduduk 2. Membuat inovasi pemutakhiran data melalui media online (Dikcapil smart)
6	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus Akta Kematian masih kurang, masyarakat harus mengurus Akta Kematian jika akan dibutuhkan	1. Sosialisasi terhadap masyarakat 2. Kegiatan mempercepat proses akta kematian 3. Aksi simpatik begitu terjadi laporan kematian dari desa-desa langsung dibuatkan akta kematian dan diserahkan kepada ahli waris sebelum proses pemakaman

3.5. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.603.079.810 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 5.457.059.709 atau sebesar 97,39% (rincian terlampir). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil pada tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya refocusing dan pandemic covid 19. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.1 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	1.338.723.897	78,80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.118.335.812	97,16
Total		5.603.079.810	97,39

Penyerapan anggaran tahun 2022 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Jika dilihat dari realisasi anggaran penyerapan anggaran dalam mendukung capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat tinggi, ini terlihat dari realisasi atau capaian masing-masing program, yaitu: 1. Program Pendaftaran penduduk realisasi anggarannya sebesar Rp 182.434.800,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 241.448.800,00 atau sebesar 97,88%. 2. Program Pencatatan Sipil realisasi anggarannya sebesar Rp 105.799.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 107.929.600,00 atau sebesar 98,03%. 3. Program Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan realisasi anggarannya sebesar Rp 983.285.297,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.001.273.000,00 atau sebesar 98,20 %.

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 97,39% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 99,37% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana atau anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisiens menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi atau sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk tahun 2022. Program dan kegiatan tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022. Dari kegiatan yang ada tersebut, kegiatan yang satu dengan yang lainnya adanya saling keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai sasaran/ target Perangkat Daerah yang direncanakan.

Tabel 3.5.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran		
		Target	realisasi	Target	Realisasi	%
1	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	87,80	91,08	1.364.259.500	1.338.723.897	98,12
2	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat Daerah	BB	100	5.603.079.810	5.457.059.709	97,39

3.6 Efisiensi Sumber daya

Efisiensi belanja pada tahun 2021 sebesar 1,37% dari total belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk Program/Kegiatan utama sebesar 1, 14% sedangkan efisiensi untuk Program/kegiatan pendukung sebesar 1,15%.

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bombana Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	1	88,60%	78,00%	99,37
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	B	B	100

BAB IV

PENUTUP

LAKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana tahun 2022 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Hal ini terlihat dari 2 indikator Kinerja yang diperjanjikan, 1 indikator kinerja sesuai dengan target dengan criteria capaian sangat baik sedangkan satu indikator dinyatakan memenuhi target yang diperjanjikan dengan kriteria capaian baik. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana pada tahun 2022 adalah amat baik. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Belanja Langsung yang pada tahun 2021 anggaran terserap 98 % lebih tinggi dari tahun 2022 anggaran terserap 97,39% karena adanya refocusing dan pandemic covid 19. Selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut munculnya permasalahan publik yang melibatkan beberapa instansi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian karena adanya komitmen bersama untuk melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan konsep e-government serta e-performance based budgeting maka target kinerja dapat dicapai dan permasalahan dapat diatasi dengan baik. Sekretariat merupakan unsur pendukung (supporting) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendalam dalam pengelolaan/manajemen unit kerja khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, melainkan juga sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi Dinas dimana unsur-unsur perencanaan,

evaluasi dan monitoring, serta pelayanan terhadap stakeholders internal, berawal dari unit-unit dalam kesekretariatan. Mengingat hal tersebut, maka fungsi dan peran Sekretariat secara otomatis merupakan faktor mendorong terwujudnya kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Di masa depan beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana ke depan karena walaupun beberapa target kinerja telah tercapai sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan masih adanya masyarakat yang belum tertib dalam pelaporan kependudukan. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan demikian LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Mengetahui,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FIRDAUS, S.Pd.M.M

Pembina Utama Muda, IV.c

NIP,19671231 198803 1 123

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Bombana selama Tahun 2018-2022. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap Tujuan OPD tersebut yaitu '"Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" yang meliputi 2 (dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indicator kinerja sasaran, dengan didukung 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indicator kinerja sasaran pada tahun 2022, yaitu 2 (dua) sasaran atau 2 (dua) indicator kinerja dicapai dengan kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian indicator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.603.079.810 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.457.059.709 atau dipresentasikan sebesar 97,39%.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	91,29%	91,29%
2	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Laporan	15%	11,50%	76%

Tabel 3.3
Capaian IKU berdasarkan Kategori

NO.	Kategori Capaian	Capaian	Jumlah Indikator
1	Baik Sekali (BS)	Labih dari 100%	-
02.00	Baik (B)	Lebih dari 75% s.d 100%	2

Tabel 3.4
Realisasi Program (outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan	100%	100%
	- Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase/Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%

	- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase/Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100%
	- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Fasilitasi dan Pembinaan	100%	100%

Chart 3.1

Perbandingan Hasil survei kepuasan masyarakat
Sekretariat Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022

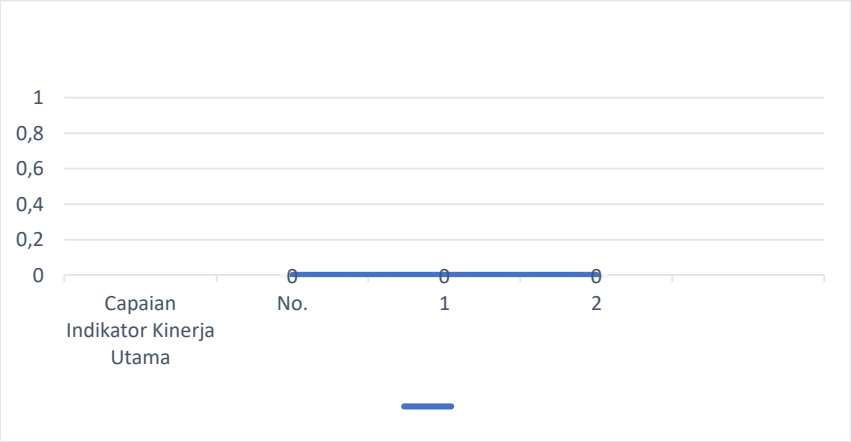

Tabel 3.5

Perbandingan Hasil survei kepuasan masyar
Sekretariat Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022 denga

Uraian	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	0	85%	90, 25%

Tabel 3.6

Program/Kegiatan yang menunjang Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	559.916.500
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	110.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.044.534.146
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.663.896.900
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.855.413.800
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	89.832.900
		Fasilitasi Bantuan Hukum	277.434.000
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	39.873.900
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	142.000.250
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	114.999.750
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	25.000.000

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	25.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	28.999.900
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	380.233.000

Chart 3.2

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan
Tahun 2018 s.d Tahun 2022

Tabel 3.7

Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten komponen Laporan
Sekretariat Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2022 dengan Target Rens

Uraian	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Laporan	9%	9%	10%	10, 51 %

Tabel 3.8

Program/Kegiatan yang menunjang Sasaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemda

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.058.250
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	60.002.200
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.004.450
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.005.850
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.058.250
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	90.000.550
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	199.997.600
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.550.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.055.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.033.877.100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	581.757.050
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.204.600.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.148.566.000

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	559.916.500		
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	110.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.044.534.146		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.663.896.900		

Tabel 3.11

Komposisi Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Belanja langsung	#########	########	97,95
2	Belanja tidak langsung	#########	########	97,9
Jumlah		#########	########	97,87

da Kab. Bombana Tahun 2022

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi dan Anggaran Yang Terkait dengan
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	#########	########	99,18
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	#########	########	97,36

	Daerah			
Jumlah		#########	########	98,27

da Kab. Bombana Tahun 2022

Tabel 3.9

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	92%	11.840.807.818	99,18
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1	76%	29.742.442.489	97,36
Jumlah		2	84%	41.583.250.307	98,27

da Kab. Bombana Tahun 2022

Tabel 3.10

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	84,65	99,18	0,82%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1	95,78	97,36	2,64%

% Pencapaian
100%
100%

100%
100%

rakat

n Target Renstra

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
7	*8*	*9*	*10*	*11*
90%	90, 25%	95%	90, 99%	100%

stra

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11%	10, 51 %	13%	11%	15%	11,50%

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

No.		Indikator	Target	Realisasi	Pencapaian

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi		Kriteria Penilaian Reali	Kode	
1		≥ 90,1	Sangat tinggi	

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kerja

No		Interval	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja	Kode
1		≥ 90,1	Sangat tinggi	

Realisasi Program (outcome) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	gram/Kegia		Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Pencapaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang memadai	##########	##########	97,16
		Perencanaan, Penganggaran,	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang baik	Jumlah dokumen Perencanaan, RKA, dan DPA yang ditetapkan	##########	164.821.871	99,73
		Administrasi Keuangan Pera	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Jumlah laporan Penatausahaan dan keuangan yang disusun	##########	##########	96,65
		Administrasi Bara	Tersedianya penatausahaan barang milik daerah yang baik	Persentase laporan hasil penatausahaan	21.060.000	21.049.230	99,95
		Administrasi Kepe	-Tingkat kedisiplinan aparatur	Cakupan administrasi kepegawaia			

		Kepegawaian Perangkat Daer	-persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi organisasi	n perangkat daerah sesuai aturan yang berlaku	49.900.000	49.891.387	99,98
		Administrasi Umum Perangkat	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	##########	520.044.642	98,85
		Pengadaan barang milik daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang dipenuhi berdasarkan standar kebutuhan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	##########	451.067.300	95,84
		Penyediaan jasa penunjang urusa	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	82.260.000	78.888.547	95,90
		Pemeliharaan barang	Terpeliharanya BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan barang milik daerah dalam kondisi baik	##########	243.487.671	99,42
	PROGRAM		Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Capaian dokumen kependudukan yang disusun dan diterbitkan	##########	241.448.800	97,81
		Pelaya	Jumlah pendaftaran penduduk	JumlahPemenuhan dokumen pendaftaran penduduk yang	##########	182.434.800	97,88
		Penyelenggaraan pendaftar	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Cakupan dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran	55.486.000	55.384.000	99,82

		Pembinaan dan pengawasan penyeleng	Jumlah pembinaan dan pengawasan Terkait Pendaftaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk	5.000.000	3.630.000	72,60
	PROGRAM		Cakupan layanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	##########	105.799.800	98,03
		Pelaya	Cakupan layanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	47.663.600	47.464.800	99,58
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terkait pencatatan sipil	persentase dokumen pencatatan sipil yang disusun dan di terbitkan	55.266.000	54.705.000	98,98
		Pembinaan dan pengawasan penyeleng	Jumlah pembinaan dan pengawasan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	55.266.000	54.705.000	98,98
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Cakupan pemanfaatan teknologi informasi administrasi kependudukan	Jumlah layanan data kependudukan yang	##########	983.285.297	98,20
			Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan			
		Pengumpulan data kepe	Persentase database kependudukan yang termanfaatkan	Persentase layanan database kependudukan yang	##########	579.653.000	98,92

		Penat aan Peng elola an Infor	Cakupan masyarakat yang terlayani dokumen kependudukannya	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan	59.971.000	59.735.937	99,61
		Peny eleng garaa n Peng elola an Infor masi	Cakupan kegiatan Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan	##########	316.107.050	96,58
		Pemb inaan dan peng	Cakupan aparatur SIAK yang terlatih	Persentase Pengelola SIAK bersertifikat	28.000.000	27.789.310	99,25
	PROGRA M PENGELO		Cakupan penyusunan profil kependudukan	Persentase penyediaan data	8.192.400	8.190.000	99,97
		Penyu	Persentase pemenuhan data kependudukan yang disajikan	Persentase profil kependudukan yang	8.192.400	8.190.000	99,97

TABEL ANALISIS CAPAIAN IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020

NO	OPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS		RENCANA AKSI TIND LANJUT TERHADAP HAMBATAN
							KEBERHASILAN	HAMBATAN	
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Tata Kelola Kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	80,9	98	121.14%	Pencapaian telah melebihi ketentuan target		
							Pencapaian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan adanya pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang sulit menjangkau ibu kota Kabupaten dan pelayanan dari rumah ke rumah bagi orang sakit, renta maupun penyandang difabel. Dinas Kependudukan juga melakukan Perjanjian Kerjasama atau MOU dengan beberapa OPD yang melakukan pelayanan dengan menggunakan NIK sehingga antusiasme masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukan meningkat.	yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pelayanan yang berbasis teknologi informasi sehingga apa yang menjadi evaluasi dari kemenpan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan	Melanjutkan amanat di administrasi kependud untuk menggunakan aplikasi teknologi infor dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ten penggunaan aplikasi tersebut.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh	BB	BB	73,38	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun laporan Kinerja tepat waktu, telah membuat PK sampai level eselon IV, serta menetapkan SK IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah menyusun rencana aksi dalam pencapaian IKU	Masih mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (e-planning/budgeting	
								Sistem pengukuran dan pelaporan kinerja belum berbasis aplikasi teknologi informasi	Menambah kuantitas d kualitas pelaporan dala penyusunan laporan ki sesuai hasil evaluasi
								Hasil penilaian SAKIP belum dijadikan dasar kebijakan reward dan punishment	

No	OPD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Tata Kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,80	91,08	103,73
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil	Penilaian SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Inspektorat	BB	BB	72,76

NO	URAIAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan pencatatan sipil	1	88,60%	78,00%	99,37
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	BB	BB	100

98	87,80%	91,08%
100		
100		
100		
61		
459		
91,8		
103,7357631		

AK P	97,81 98,03 98,20 99,97 394,01 78,802
litjen lukan masi i	
ntang	1364259500 98,12824444
dan am inerja	

ANALISIS		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TERHADAP HAMBATAN
KEBERHASILAN	**HAMBATAN**	
Pencapaian telah melebihi ketentuan target		
Pencapaian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan adanya pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang sulit menjangkau ibukota Kabupaten dan pelayanan dari rumah ke rumah bagi orang sakit, renta maupun penyandang difabel, Dinas Kependudukan juga melakukan perjanjian kerjasama atau MOU dengan beberapa OPD yang melakukan pelayanan dengan menggunakan NIK sehingga antusiasme masyarakat dalam memenuhi dokumen kependudukan meningkat	Yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pelayanan yang berbasis teknologi informasi sehingga apa yang menjadi evaluasi dari Kemendagri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan	Melanjutkan amanat Ditjen Administrasi Kependudukan untuk menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan sosialisasi kepeada massyarakat tentang penggunaan aplikasi tersebut
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, telah membuat PK sampai ke level Eselon IV, serta menetapkan SK IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah menyusun rencana aksi dalam pencapaian IKU	Masih mengembang kan sistem perencanaan yang berbasia aplikasi teknologi	
	Sistem pengukuran dan pelaporan kinerja belum berbasis aplikasi teknologi informasi	Menambah kualitas dan kuantitas pelaporan dalam penyusunan laporan kinerja sesuai hasil evaluasi

	Hasil penilaian SAKIP belum dijadikan dasar kebijakan reward dan punishment	